BAB III

A POWERFUL, COMPETENT AND INSULATED ECONOMIC BUREAUCRACY & DEVELOPMENTAL STATES AND CIVIL SOCIETY

Adanya Kementerian Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah dapat memberikan jaminan serta perlindungan bagi sektor industri termasuk di dalamnya sektor industri otomotif. Sektor industri otomotif yang telah memiliki dukungan dari kementerian-kementerian ini tentu akan mendorong berjalan lancarnya sektor tersebut sehingga diharapkan dapat membantu perekonomian negara Indonesia. Hal ini mengingat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah di bawah Presiden yang dimaksudkan untuk tujuan nasional, tentunya juga harus mendapat dari berbagai kalangan terutama dari elemen pemerintah itu sendiri.

3.1 *A Powerful, Competent and Insulated Economic Bureaucracy*

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo setelah memutuskan untuk menjalankan kebijakan terkait pengembangan sektor industri otomotif mobil pedesaan, kemudian menunjuk badan-badan yang mengatur terkait birokrasi seperti:

A. Kementerian Perindustrian

Kementerian Perindustrian merupakan badan yang berada di bawah arahan Presiden Joko Widodo dalam menjadi pelaksana kebijakan industri yang ada di Indonesia. Kemenperin juga bertugas membantu pemerintah dalam mengelola aset dan kekayaan milik negara, menyelenggarakan urusan di bidang perindustrian dan

mengawasi agar kegiatan tersebut berjalan dengan semestinya. Terdapat lima sektor industri dari berbagai industri yang terdapat di bawah kemenperin, lima industri ini memberikan kontribusi besar bagi PDB negara. Lima industri tersebut adalah industri sektor makanan dan minuman, sektor testil dan pakaian, sektor elektronik, industri kimia dan juga sektor industri otomotif (Kemenperin, 2016). Kebijakan industri otomotif mobil pedesaan termasuk di dalam sektor industri otomotif nasional.

Kementerian Perindustrian pada industri otomotif mobil pedesaan memberikan dukungan kepada pihak-pihak terkait melalui kebijakan-kebijakan seperti program pendidikan dan pelatihan vokasi menuju era industri 4.0. Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan SDM di politeknik-politeknik yang ditunjuk oleh Kemenperin untuk bisa mempersiapkan tenaga ahli industri mobil pedesaan. Pelatihan-pelatihan ini melibatkan politeknik sebagai institusi pendidikan, siswa-siswi yang menerima pelatihan sebagai sumber SDM masa depan bagi industri otomotif mobil pedesaan dan Kemenperin sebagai pengambil kebijakan sekaligus pengawas berjalannya pelatihan ini.

Kebijakan kedua yaitu Kemenperin menunjuk dan menyiapkan perusahaan-perusahaan yang bertugas untuk mengakomodasi bahan baku produksi untuk mensuplai kebutuhan industri otomotif mobil pedesaan. Perusahaan yang ditunjuk adalah PT. Krakatau Steel untuk menyediakan sekaligus mensuplai bahan baku baja kepada industri-industri produksi (Jati, 2016). Penunjukan PT. Krakatau Steel sekaligus dapat mendukung kebijakan pemerintah lain seperti penggunaan komponen lokal dalam industri yang ada di dalam negeri.

Kebijakan ketiga yaitu Kemenperin dalam upaya implementasi kebijakan industri otomotif mobil pedesaan bakal menggandeng sentra-sentra IKM (Industri Kecil Menengah) komponen otomotif yang terdapat di beberapa wilayah di Indonesia seperti Tegal 50 IKM, Klaten 10 IKM, Purbalingga 138 IKM, Sidoarjo 134 IKM, Juwana 30 IKM, Pasuruan 49 IKM, Sukabumi 20 IKM dan Bandung 15 IKM. Selain itu, Kemenperin juga berupaya menggandeng 250 IKM Karoseri yang terdapat di beberapa wilayah seperti Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Lampung dan Sumatera Utara. Ditambah dengan menggandeng 600 IKM terkait alat dan mesin pertanian yang terdapat di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Citizendaily, 2017). Tindakan ini diambil untuk selain menjamin berjalannya industri otomotif mobil pedesaan, juga sekaligus mensejahterakan berbagai Industri Kecil Menengah dalam negeri yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Kemenperin dengan wewenangnya juga melakukan penunjukan secara langsung terhadap IOI selaku koordinator dalam melakukan pengembangan dan memproses purwarupa kendaraan yang akan diproduksi oleh industri. Institut Otomotif Indonesia atau IOI merupakan lembaga riset yang bergerak dalam bidang pengembangan otomotif yang terdapat di Indonesia dengan memberikan pelatihan dan memberikan sertifikasi khusus untuk industri otomotif nasional (Bagja, 2016). I Made Dana Tangkas selaku pemimpin dalam IOI merupakan Direktur dari PT. Toyota Manufacturing Indonesia. I Made yang ditunjuk sebagai Presiden IOI oleh Kemenperin memiliki kecakapan dalam hal industri manufaktur otomotif dan juga termasuk tokoh yang berada di lingkup Presiden Joko Widodo.

Kewenangan ini agar IOI dapat memenuhi keinginan agar mobil pedesaan yang diproduksi dapat bersifat multi fungsi dan terintegrasi dalam produksi baik di pusat hingga daerah, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di pedesaan (Nayazri, 2016). I Made Dana Tangkas selaku pemimpin dalam IOI yang ditunjuk oleh Kemenperin bertugas menjalankan fungsi organisasinya untuk melakukan *think tank* dalam menganalisis pengembangan sumber daya manusia dan membangun lingkungan yang mendukung tumbuhnya industri otomotif mobil pedesaan yang terdapat di Indonesia.

Keseriusan IOI dalam menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah diperlihatkan melalui aktivasi perwakilan khusus di Kantor Pusat Kemenperin di Jakarta Selatan. IOI juga meningkatkan daya saing tenaga kerja lewat skema vokasi antara pelaku industri dan dunia pendidikan. Selain itu, juga berupaya terus mengembangkan kemampuan industri kecil dan menengah dan para pemasok komponen lokal di sektor otomotif. IOI melakukan semua dengan fokus tujuan untuk mendorong dan menjadikan Indonesia sebagai basis utama produksi di Asia Tenggara (Motoris, 2018).

Kewenangan lain juga terkait dalam memilih siapa-siapa saja pelaku industri otomotif dalam negeri yang akan melakukan pengembangan produk (Kemenperin, 2017). Kementerian Perindustrian di bawah kepemimpinan Airlangga memberikan komitmen untuk mengembangkan industri mobil pedesaan sehingga kedepannya siap untuk berkompetisi dalam pasar global.

B. Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan merupakan badan yang yang bertugas dalam membantu berjalannya kebijakan industri mobil pedesaan melalui sektor ekonomi dan pajak. Kemenkeu berupaya mengeluarkan peraturan kementerian terkait pemberian intensif agar dapat menarik minat produsen dalam negeri untuk berlomba-lomba memproduksi mobil pedesaan. Pemberian Insentif ini merupakan kebijakan langsung dari Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada para pelaku industri. Beberapa insentif itu antara lain insentif bea masuk, insentif pembebasan dan pengurangan pajak (Kemenkeu, 2019).

Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mewacanakan memberikan pajak yang rendah bagi masyarakat yang membeli dan menggunakan produk-produk yang dihasilkan oleh industri mobil pedesaan tersebut. Hal ini sebagai bentuk dukungan dari Kemenkeu terhadap sektor industri mobil otomotif, karena industri ini bersifat potensial dan perlu terus didorong dan dikembangkan oleh pemerintah.

Dirjen Pajak yang berada di bawah arahan Sri Mulyani juga mewacanakan mengeluarkan kebijakan peniadaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) bagi hasil produksi industri mobil pedesaan dalam negeri. Diharapkan penghilangan PPnBM ini dapat menarik minat konsumen untuk membeli mobil pedesaan karena harga yang terjangkau. Selain itu Kemenkeu juga melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan agar turut membantu pengembangan inovasi (Kemenperin, 2018). Kemenkeu di bawah arahan Sri Mulyani memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan fiskal untuk memastikan program yang diterapkan dapat menarik masyarakat untuk membeli hasil karya industri ini.

Terkait dengan penghilangan PPnBM, maupun subsidi dalam proses pengembangan industri mobil pedesaan. Sebenarnya hal ini dapat dianggap sebagai sebuah upaya proteksi dari pemerintah terhadap industri dalam negeri, yang dimaksudkan agar dapat bersaing dengan industri otomotif global. Industri otomotif mobil pedesaan ini ibarat bayi yang diberikan kemudahan oleh pemerintah selaku orangtua untuk mendapatkan akses-akses makan dan minum tanpa harus berjuang seperti yang dilakukan oleh industri global pada saat datang dan bersaing ke Indonesia. Sehingga pada saat kedepannya nanti akan dilepas bersaing, saat dirasa industri mobil pedesaan ini sudah mampu bersaing dalam skala global. Meskipun kebijakan akan penghilangan PPnBM dan subsisdi dapat membantu memajukan industri otomotif nasional agar dapat berjalan, namun hingga saat ini masih belum ada penghilangan PPnBM dan juga subsidi yang diwacanakan oleh pemerintah terkait mobil pedesaan.

Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pihak yang dilibatkan terkait pengembangan mobil pedesaan itu sesuai dengan tujuan awal Presiden Joko Widodo yang menginginkan agar industri mobil pedesaan bisa memberikan keuntungan ekonomi dalam jangka panjang kepada masyarakat dan negara dan mampu bersaing dalam industri otomotif global. Keputusan dan kebijakan hasil dari interaksi masing-masing aktor elit yang telah disebutkan dimaksudkan untuk memberikan keuntungan ekonomi dari produksi mobil pedesaan. Hal tersebut sesuai dengan poin *A Powerful, Competent, and Insulated Economic Bureaucracy* yang dikemukakan oleh Adrian Leftwich pada teorinya (Leftwich, 1995).

3.2 *Developmental States and Civil Society*

Dalam pembuatan kebijakan terkait pengembangan sektor industri otomotif mobil pedesaan di bawah arahan Presiden Joko Widodo, tidak dilakukan berdasarkan aspirasi masyarakat yang secara langsung disampaikan kepada pemerintah. Namun, kebijakan ini diambil setelah melihat bahwa dalam menghadapi persaingan industri global dalam hal mobil nasional, Indonesia cukup tertinggal dibandingkan negara-negara seperti Amerika, Jepang dan Eropa. Mau tidak mau pemerintah harus memikirkan langkah lanjutan untuk mengamankan keberlangsungan industri otomotif dalam negeri dan pilihan akhirnya jatuh pada pengembangan industri mobil pedesaan. Keputusan untuk mengembangkan industri mobil pedesaan selain sebagai upaya untuk merebut pangsa pasar global dalam hal kendaraan pedesaan, juga dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam melakukan kegiatan seperti bertani, berladang, dan kegiatan lain yang terkait dengan penghasilan masyarakat.

Aktor non-negara lain yang turut dilibatkan oleh pemerintah dalam menjalankan kebijakan pengembangan industri mobil pedesaan adalah GAIKINDO (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia). GAIKINDO adalah organisasi nirlaba yang beranggotakan perusahaan agen pemilik merk atau APM produsen kendaraan bermotor, distributor kendaraan bermotor, dan juga produsen komponen utama kendaraan bermotor (GAIKINDO, -). Yohannes Nangoi selaku ketua umum dari GAIKINDO sebelumnya pernah menjabat sebagai Presiden Direktur PT. Isuzu Astra Motor (IAM).

GAIKINDO berperan membantu pemasaran dari produk mobil pedesaan dengan cara memberikan kesempatan bagi produsen-produsen mobil pedesaan

untuk dapat tampil pada acara tahunan GAIKINDO yaitu GIIAS (*GAIKINDO Indonesia International Auto Show*) yang di adakan pada tiap tahunnya. GIIAS adalah pameran otomotif bertaraf internasional yang dilaksanakan di Indonesia. Acara tersebut dihadiri oleh berbagai produsen maupun konsumen dari seluruh dunia yang dimana hal tersebut dapat memberikan dampak yang besar terhadap produsen otomotif lokal dalam memasarkan produknya ke mancanegara (Indonesia Auto Show, 2015).

(Source: Liputan 6)

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mobil pedesaan juga mengutamakan bekerja sama dengan para pihak swasta seperti penggiat industri otomotif GAIKINDO maupun Institut Otomotif Indonesia yang berada di bawah kemenperin. Pemerintah membuat kebijakan tidak langsung melibatkan masyarakat umum namun lebih kepada para pelaku industri otomotif yang ada di Indonesia seperti Astra, IOI, dan GAIKINDO. Meskipun GAIKINDO membantu dalam memasarkan AMMDes melalui GIIAS, tidak ada dorongan aspirasi yang besar terhadap industri mobil pedesaan ini dan tindakan GAIKINDO ini hanya sebatas pada bentuk dukungan secara tidak langsung.

Selama ini kebijakan yang telah dibuat selalu berpusat kepada pemerintah, meskipun ada beberapa kebijakan yang didiskusikan bersama dengan pihak-pihak non-pemerintah yang berpengaruh pada kebijakan tersebut. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tentunya saja dengan melihat kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat pedesaan yang nanti akan berpusat dan dikhususkan untuk masyarakat pedesaan, petani, serta penggiat UMKM.

Karena bagaimanapun juga sumber daya untuk bisa melakukan riset dan penelitian serta pengembangan terkait industri dalam suatu negara, keputusannya berada di tangan pemerintah negara tersebut. Pihak-pihak non-negara dapat terlibat sepanjang diizinkan oleh pemerintah, termasuk dalam hal ini masyarakat dapat memberikan aspirasi terkait kebijakan tersebut namun tetap keputusan akhir berada di tangan pemerintah. Sebagai penjelasan dalam hal ini, kebijakan pengembangan industri mobil pedesaan telah disepakati oleh pemerintah dan para kementerian-kementerian terkait baru kemudian pihak-pihak seperti GAIKINDO dan IOI dilibatkan dalam proses kedepannya. Hal ini sesuai dengan indikator dari *Developmental State* terkait *Developmental State and Civil Society*, bahwa kebijakan yang diambil pemerintah lebih bersifat *top to down*, dimana masyarakat bukan pihak yang menjadi pendorong adanya kebijakan ini.

Meskipun pemerintah yang selama ini dalam membangun industri otomotif lebih berfokus kepada kebutuhan industri otomotif dan tidak terlalu fokus terhadap kebutuhan masyarakat, namun khusus untuk industri mobil pedesaan pemerintah terlihat berupaya memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat pedesaan dalam pengerjaan industri mobil pedesaan karena mobil pedesaan dapat diubah fungsinya sesuai dengan

kebutuhan masyarakat seperti menggiling padi maupun mesin pompa untuk irigasi (Handoko, 2018). Melihat dari apa yang hanya difokuskan pemerintah, pemerintah lebih mementingkan kebutuhan industri otomotif demi kepentingan nasional tanpa melibatkan dorongan aspirasi masyarakat secara luas, hal ini termasuk dengan apa yang dipaparkan Adrian Leftwich yang menganggap bahwa sudah seharusnya pemerintah memulai suatu kebijakan demi kepentingan nasional (Leftwich, 1995).

Namun, saat ini ditemukan bahwa tidak ada langkah lebih lanjut untuk mengembangkan sektor industri mobil pedesaan ini. Pemerintah terlihat tidak fokus, hal ini terkait tidak ada kebijakan lanjutan mengenai insentif-insentif untuk industri kecil menengah yang bergerak dalam industri mobil pedesaan, yang ada hanya kebijakan insentif bagi keseluruhan industri otomotif di Indonesia. IKM-IKM juga tidak secara langsung dilibatkan dalam perumusan kebijakan mengenai industri mobil pedesaan, akan tetapi Pemerintah malah mengajak aktor swasta yang lebih besar yang tergabung dalam GAIKINDO.